BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat dan sebagai lembaga yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan terlebih bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha tersebut membutuhkan dana dalam upaya membiayai kegiatan usahanya. Dalam hal ini lembaga perbankan berperan penting dalam rangka memenuhi kebutuhan permodalan bagi para perlaku usaha tersebut. Kemudian dalam penyediaan dana untuk para pelaku usaha tersebut dapat di peroleh dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perbankan. Oleh karena itu, Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang penting dalam kehidupan perekonomian.

Para industri perbankan dalam rangka menunjang perekonomian dapat dilakukan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sumber perolehan dana bank berasal dari simpanan atau tabungan masyarakat yang dimasukkan dalam bank berupa giro, deposito tabungan dan sebagainya yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana terutama pada dunia usaha dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada nasabahnya.

Dengan adanya kredit maka memberikan pendapatan bagi bank. Kredit adalah sumber pendapatan terbesar bagi bank dan merupakan kegiatan yang memiliki

nilai aset terbesar dibandingkan dengan opersional bank yang lain. Peningkatan pemberian kredit oleh bank akan dapat meningkatkan pendapatan, yaitu berupa bunga bank atas kredit yang diberikan. Namun disamping itu peningkatan pemberian kredit juga akan diikuti oleh tingginya resiko bagi bank. Resiko tersebut adalah tidak tertagihnya keredit nasabah. Tidak tertagihnya kredit ini akan menjadi sebuah ancaman jika pihak perbankan tidak segara mengambil langkah penyelesaian. Dalam usahanya pencegahan tidak tertagih kredit, salah satu cara yang dapat diterapkan manajemen bank yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya khususnya pada persetujuan pemberian kredit.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah di suatu bank, sistem pengendalian intern harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sistem pengendalian intern yang baik akan sangat membantu organisasi dalam menghindari adanya *Fraud* atau kecurangan-kecurangan yang akan merugikan nasabah serta bank (organisasi) itu sendiri.

Pengendalian intern kredit adalah usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Tujuan utama dari dari pengendalian intern kredit suatu bank adalah untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, mengetahui kredit yang disalurkan apakah itu lancar atau tidak , melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah, mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik ataumasih perlu disempurnakan, memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali,

mengetahui posisi presentase yang dilakukan bank dan meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan.

Dengan terselengaranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang kredit, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut. Pengendalian intern yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit macet serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja. Pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut terhindar dari kesalahan-kesalahan atau penyelewengan.

Pelaksanaan pengendalian internal kredit di perbankan adalah dengan adanya struktur organisasi yang memadai yaitu dengan adanya pembagian tugas yang sesuai dengan fungsi-fungsinya yang dibutuhkan, Seperti adanya pemimpin manajer, sepervisor manajer dan lain-lain, perhatian dan arahan manajemen bank dengan menjadi *coach* yang baik dan memberikan motivasi kepada karyawan serta komite lainnya seperti komite manajemen resiko. Pengendalian intern kredit diperbankan juga dapat dilakukan dengan menerapkan analisi 7p yaitu analisis untuk menilai nasabah dari segi keperibadiannya dimasa lalu (*Personality*), mengklasifikasi nasabah (*Party*), mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit (*Purpose)*, menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang (*Prospect*), cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah di ambil (*Payment*), menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba (*Profability*), serta menjaga kredit agar yang diberikan mendapat jaminan perlindungan (*Protection*). Selain itu pengendalian internal kredit di perbankan dapat dilakukan dengan

analisis 5C yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui watak atau sifat calon nasabah (*Character*), mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit (*Capacity*), kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur (*Capital*), penilaian jaminan kredit yang diberikan calon debitur (*Collateral*), menilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang (*Condition*).

Efektivitas pemeberian kredit erat kaitannya dengan tujuan kredit yaitu *Profitability* dan *sofety* . *Profitability* menyangkut keuangan dari bunga kredit, sedangkan *sofetye* menyangkut kelancaran dari bunga kredit. Apabila memiliki keuntungan dari bunga kredit dan debitur dalam pengembalian kreditnya kepada bank maka dapat dikatakan pengendalian efektif. Disamping itu,apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegiatan dalam sistem pemberian kredit pada dasarnya merupakan unsur-unsur pengendalian internalnya. Kegagalan kredit juga merupakan kegagalan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas yang tercapai.

Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka resiko yang akan terjadi juga semakin besar. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank. Karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektifitas sistem pemberian kredit.

PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur , merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dananya kepada masyarakat dan dana yang diberikanadalah berupa kredit. PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perbaungan Hombar Makmur menerapkan prosedur dan kebijakan dengan baik dalam pemberian kredit, namun disisi lain terdapat masalah yang di alami PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur .kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Debitur yang tidak dapat membayar tunggakan 1-2 bulan disebut dengan dalam perhatian khusus (DPK). Hal ini terjadi karena adanya nasabah yang mengajukan kredit pada bank tersebut ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban dalam melunasi kredit. Adapun debitur yang kreditnya kurang lancar, diragukan dan macat atau tidak dapat dibayar tunggakan lebih dari 90 hari harus disebut kredit bermasalah (*Non performing loan*), hal ini terjadi oleh dua faktor yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal non bank debitur. Faktor internal banak adalah faktor yang berasal dari bank itu sendiri biasanya seperti kegiatan ekspansi penyaluran kredit yang besar-besarannya tanpa adanya standarisasi analisis calon debitur dan pengawasan yang tidak maksimal oelh bank. Faktor eksternal adalah faktor yang bukan disebabkan oleh bank dan debitur, yaitu seperti adanya pengaruh inflasi dan kurs, persaingan usaha, kondisi usaha, dan faktor alam.

Fenomena Pemberian yang dilakukan PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur mengandung resiko yang berupa tidak lancarnya pembayaran kredit yang akan mempengaruhi kinerja bank, dan juga terdapat beberapa kasus yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Misalnya untuk jenis kredit usaha kecil, kebanyakan debitur

tidak dapat menyediakan jaminan atas kredit padahal penyaluran kredit pada usaha kecil sangat diperlukan, baik baik untuk perkembangan usaha debitur maupun bagi bank itu sendiri. Penilaian atas kelayakan usaha debitur dapat juga mengalami kendala karena debitur tidak dapat menyediakan informasi secara lengkap. Keadaan tersebut dapat menyabebkan pemberian kredit menjadi kurang efektif dan sering juga calon debitur memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Tabel 1.1

Jumlah pemberian Kredit Modal Kerja PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur

Keterangan	Jumlah Kredit yang diberikan Tahun 2019	Jumlah Kredit yang diberikan Tahun 2020
Kredit Lancar	18.134.507.363	19.164.625.922
Kredit Dalam Perhatian Khusus	3.579.890.791	4.778.719.200
Kredit Kurang Lancar	1.000.000	8.831.633
Kredit Diragukan	50.600.000	164.731.600
Kredit Macat	1.096.826.600	1.229.379.400
Total Kredit	22.862.624.754	25.346.287.775

Sumber : **PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur**

Dari tabel 1.1. dapat diketahui pada bahwa pada tahun 2019 total kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp. 22.862.624.754,- dan total kredit yang diberikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 25.346.287.775.-. Pemberian kredit lancar pada tahun 2019 sebesar Rp. 18.134.507.363.- dan tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 19.164.625.922,-. Kredit macet yang diberikan perusahaan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp**.** 1.229.379.400,- dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar Rp. 1.096.826.600,-. Kredit macet meningkat dapat dikatakan bahwa pengembalian kredit semakin tidak baik. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya perhatian dan penerapan sistem pemberian dan penagihan kredit bagi beberapa nasabah dari petugas kredit sehingga kredit cukup mudah untuk dicairkan. Salah satu cara untuk menghindari kredit bermasalah adalah dengan melakukan pengendalian intern pemberian kredit yang efektif, seperti penjagaan dan pengawasan terhadap kekayaan perbankan dibidang kredit.

Kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL), menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut?. Kredit macet di sebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal .Faktor internal penyebeb timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan perkreditan, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi serta sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalah usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, jika kredit

yang telah berjalan mengalami kemacatan ataupun penunggakan, mala pihak bank perlu membuat kebijakan misalnya, memberikan surat peringatan kepada nasabah.

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi suatu cara yang digunakan oleh peminjam perusahaan guna mengawasi yang dijalankan perusahaan untuk memberi keyakinan yang memadai tentang pencapaian kehadalan laporan keuangan, efektif dan efesiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Pengendalian intern yang tepat sangat berperan dalam pemberian kredit. Pengendalian intern dalam sistem pemberian kredit terdiri dari pemberian kredit kepada nasabah yang harus di ikuti dengan kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, analisis kredit oleh bank, keputusan atau permohonan apakah diterima atau di tolak.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya pengendalian intern pemberian kredit , maka penulis tertarik untuk mngentahui sejauh mana pengendalian intern atas pemberian kredit yang telah diterapkan oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur dan tertarik melakukan penelitian dengan judul "**PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PERBAUNGAN HOMBAR MAKMUR".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pengendalian intern atas pemberian kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Perbaungan Hombar Makmur.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, lebih fokus, dan menghindari pembahasan yang terlalu luas maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini yaitu hanya berkaitan dengan "Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur ". Penulis memilih pengendalian intern pemberian kredit karena dalam suatu bank kredit merupakan kegiatan yang memiliki asat terbesar, serta banyaknya kasus kredit bermasalah yang terjadi didalam suatu bank. Maka penulis ingin meneliti apakah PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur telah melakukan pengendalian intern yang baik dan tepat dalam peroses pemberian kredit untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah yang dapat merugikan bank tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan meganalisis pengendalian intern pemberian kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Perbaungan Hombar Makmur.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Dalam teori Berarti memproleh pemahaman dan penghayatan yang diproleh pada saat kuliah. Dalam

Praktek, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penerapan dalam kegiatan perusahaan, khususnya di bank perkreditan rakyat. Dapat mengetahui dan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang perkreditan khusunya pada pemberian kredit.

2.Bagi Perusahaan

Dapat sebagian bahan masukan bagi perusahaan yang diteliti mengenai pengendalian intern pemberian kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Pengertian Pengendalian Itern

Pengendalian intern mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi perusahaan. Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah di gunakan dalam perusahaan untuk mengamankan asetnya. Pengendalian intern merupakan salah satu alat yang dapat membantu manajemen dalam melakukan tugasnya dan membantu manajemen untuk menilai organisasi yang ada serta operasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Mei H. M. Munte mengemukakan bahwa:

Pengendalian intern merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu atau merupakan rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pengendalian intern bukan hanya terdiri atas pedoman, kebijakan, dan formulir namun dijalankan oleh setiap orang dari jenjang organisasi mulai dari manajemen atas, tengah, bawah bahkan sampai tingkat personnel operational. Pengendalian internal diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas.[1]

Mulyadi mendefinisikan bahwa "sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk

---

[1]Mei H. M. Munte, **Sistem Informasi Akuntansi 1**: Universitas HKBP Nommensen , Medan, hal. 130
.

menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akutansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijkan manajemen".[2]

Horngern, Walter dan Lindah (2006:372) menyatakan pengendalian intern adalah suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait diterapkan oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisisensi operasi dan memastikan keandalan pencatatan akuntansi.

COSO dalam Widjadja (2012), mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga kelompok tujuan utama, yaitu efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku[3]".

Pengendalian intern dalam perusahaan bertujuan untuk mengarahkan operasi dan mencegah penyelewengan atau penyalah gunaan dalam perusahaan. Didalam perusahaan manager atau direktur berusaha mencari cara untuk mengendalikan atau meminimalkan resiko yang akan terjadi untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan keterengan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian intern yaitu suatu rencana yang digunakan dalam mengambil tindakan korektif apabila terjadi kesalahan atau penyelewengan dalam mencapai tujuan perusahaan.

---

[2] Mulyadi , ***Sistem Akuntansi,*** Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hal. 129.

[3] Fardila A Salim,**Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Bukopin Manado,** Jurnal Emba, Vol.3, No 1 Maret 2015, Hal.1034-1043.

2.1.2. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern akan terlaksana dengan baik apabila pengendalian intern dijalankan dengan baik pula sesuai dengan prosedur yang ada.

Adapun tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:

a. **Menjaga asset perusahaan.**
b. **Mengecek ketelitian dan keandalaan data akuntansi**
c. **Mendorong efesiensi, dan**
d. **Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen**[4].

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai pengendalian intern ini adalah untuk menjaga keamanan harta milik suatu perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, menunjukkan efesiensi dalam operasi dan membantu agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.1.3.Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Unsur pokok sistem pengendalian intern (Mulyadi) adalah :

1. **Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**
2. **Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.**

---

[4] Mulyadi ,Op.Cit., hal. 140

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.[5]

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiataan pokok perusahaan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Dalam organisasi, perlu dirancang berbagai metode untuk merekayasa praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: (1) pengggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang, (2) pemeriksaan mendadak (surprised audit), (3) setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi orang lain, (4) perputaran

[5].Mulyadi, Op.Cit., hal. 130.

jabataan, (5) keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, (6) secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya, (7) pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk menciptakan pengendalian intern dalam perusahaan, perlu diperoleh mutu karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh: (1) seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya, (2) pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan pengembangan pekerjaannya.

2.1.4. Komponen Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern terdiri dari 5 unsur pokok (komponen) yang saling berkaitan berikut ini :

1. Lingkungan Pengendalian

   Lingkungan Pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan.

   Lingkungan pengendalian intern memiliki beberapa unsur :

   a) Filosofi dan gaya operasi

   b) Integritas dan nilai-nilai etika

   c) Komitmen terhadap kompetensi

   d) Struktur organisasi

e) Pemberian wewenang dan tanggung jawab

f) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

g) Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaaan

h) Metode pengendalian manajemen

i) Kesadaran pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi untuk membentuk unsur-unsur pengendalian internal yang baik. Sebagai contoh adalah kebijakan operasional terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) kaitannya dengan pengembangan, tata kelola, pelatihan atau evaluasi jabatan. Tanpa didukung dengan kebijakan yang baik, sulit bagi perusahaan untuk memiliki SDM unggul yang memiliki kompeten sesuai dengan tujuan perusahaan.

2. Penaksiran Resiko

   Manajemen harus mengidentifikasi dan menaksir resiko yang relevan yang dapat mencegah perusahaan mencapai tujuan organisasi. Manajer juga harus menyusun rencana untuk mengelola resiko yang telah diidentifikasi.

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

   Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Secara umum, aktivitas pengendalian terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

a. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai

b. Pemisahan tugas

c. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai

d. Penjagaan aset dan catatan yang memadai

e. Pemeriksaan independen atas kinerja.

4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

   Informasi adalah data yang sudah di kelola yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

5. Pengawasan (*monitoring*)

   Pengawasan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

2.2. BANK

2.2.1.Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan dipedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa uang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan.

Menurut Malayu S.P Hasibuan **"Bank adalah badan usaha yang wujutnya memuaskan keperluan orang lain, dengan meberikan kredit berupa yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam"**[6]

---

[6] Melayu S.P Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan** PT.Bumi Aksara Cetakan kesebelas,Jakarta 2011,Hal 2

Menurut Hamonangan Sialagan " **Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannnya dalam bentuk aktiva produltivitas misalnya kredit**[7]".

Sedangkan Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 ,Tentang perbankan, **"Bank merupakan bandan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".**[8]

2.2.2. Jenis-jenis Bank

1.Dilihat dari segi Fungsinya

Namun setelah keluar UU Pokok perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

   Bank Umun adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering di sebut bank komersil (*Commrcial bank*)

---

[7] Hamonangan Sialagan, **Akuntansi Perbankan**:Universitas HKBP Nommnensen Medan, 2019, hal.87

[8] Ibid, Hal .25

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2.Dilihat dari segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :

a. Bank Milikm Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modal dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian sahamnya didirikan oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimilki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarkat, bank umum dapat dibagi kedalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula.

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, trevellers cheque, pembukuan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prisip konvensional (Barat)

   Mayoritas bank yang berkembang diindonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada perinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa indonesia dimana asala mula bank di indonesia dibawa oleh kolonial Belanda

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (islam)

   Bank berdasrkan prinsip syariah belum lama berkembang di indonesia. Namun diluar negeri terutama di negara-negara timur tengah seperti mesir atau pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang sangat pesat sejak lama.

2.3. Falsafah Perkreditan

2.3.1.Pengertian Kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memproleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari tau memproleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu (Kamsir, 2000: 72)

Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit,

bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di pihak lain, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.[9]

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

"**Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".**

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Adanya suatu penyerahan uang, tagihan, atau barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan pemberian pinjaman akan memeproleh suatu tambahan nilai pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga.
b. Proses kredit itu telah didasarkan dari suatu perjanjian yang saling mempercayai antara kedua belah pihak, kedua belah pihak ini akan memenuhi kewajibannya masing masing
c. Adanya kesempatan pelunasanan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian kredit itu mulai dari pengajuan kredit , penelitian pinjaman sampai pada pencairan kredit. Sehingga

[9] Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman , **Hukum Perbankan**, Cetakan Pertama Sinar Grafika Jakarta.2010. hal 263.

membentuk suatu sistem yang saling berurutan dan berkaitan dalam pelaksanaan pemberian kredit.

Dari pengertian tersebut terkandung makna bahwa terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu pemberian kepercayaan kepada satu pihak dan pihak lain yang memberikan kepercayaan atau disuatu pihak sebagai pemberi prestasi dan dilain sisi terdapat pihak yang memberikan kontra prestasi. Maka dari kegiatan kredit terdapat dua pihak pemberi kredit dan penerima kredit pada masa yang akan datang memberi kontra prestasi sesuai dengan segala sesuatu yang telah dijanjikan.

2.3.2. Jenis-Jenis Kredit

Beraneka ragamnya jenis kegiatan usaha yang ada didalam masyarakat mempengaruhi jenis-jenis kredit yang disediakan oleh Bank. Hal ini sebagai salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan diversifikasi produk perbankan yang ditawarkan. Secara, umum jenis –jenis kredit yang disalurkan oleh Bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

Kredit dilihat dari segi kegunaan.

Kredit dilihat dari segi tujuan kredit.

Kredit dilihat dari segi jangka waktu.

Kredit dilihat dari segi jaminan.

Kredit dilihat dari segi sektor usaha.[10]

Kredit dilihat dari segi kegunaan, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

---

[10] Thamrin Abdullah, **Bank dan lembaga keuangan,** Cetakan kedua: PT Raja GrafindoPersada, 2013, hal.169-172.

a. Kredit investasi, merupakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pribadi baru untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasinya.

Kredit dilihat dari segi tujuan kredit, dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kredit Produktif, merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi maupun investasi.

b. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara peribadi.

c. Kredit perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang daganagan untuk pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

Kredit di lihat dari segi waktu, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu (1) tahun/priode atau paling lama satu (1) tahun/priode dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengambilannya diatas satu (1) tahun/priode.

Kredit dilihat dari segi jaminan, maka kredit dapat dielompokkan sebagai berikut :

a. Kredit dengan jaminan yaitu, kredit yang diberikan dengan satu jaminan. b. Kredit tanpa jaminan yaitu, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Kredit dilihat dari segi sektor usaha, maka kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
b. Kredit perternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya, peternakan Ayam dan jangka panjang misalnya perternakan Kambing atau Sapi
c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
d. Kredit pertambangan, yaitu jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang Emas, Minyakk dan Timah.
e. Kredit profesi, yaitu diberikan kepada profesi seperi deosen, dokter atau pengacara.
f. Kredit perumahan, yaitu untuk membiayai pembangunan atau pembalian perumahan.

2.3.3. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kredit baru akan diberikan jika kreditur benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai degan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak.Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan dapat memberikan kredit.

Unsur-unsur yang terkandung didalam pemberian kredit antara lain :

1. **Kepercayaan**

2. **Kesepakatan**
3. **Jangka Waktu**
4. **Resiko**
5. **Balas Jasa**[11]

1. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan, merupakan suatu tujauan dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya msing-masing.

3. Jangka waktu, merupakan masa pengambilan kredit yang telah di sepakati bersama. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

4. Resiko, merupakan suatu dampak pemberian kredit karena adanya tenggang waktu pengambilan (jangka waktu) pinjaman.

5. Balas Jasa, merupakan keuntungan yang diperoleh kreditur atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk konversional atau bagi hasil

2.3.4. Tujuan Kredit

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2008:88) mengemukakan bahwa terdapat 7 tujuan dari penyaluran kredit, antara lain ialah untuk :

1. Memperoleh pendapatan bank ddari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana kredit.

---

[11] Kamsir. 2012. **Manajemen Perbankan**. Jakarta : Grafindo Persada

3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Kasmir 2006) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan Bank atau non Bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan Yaitu bertujuan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya serta dapat membesarkan usaha bank.
2. Membantu usaha nasabah Yaitu agar dapat mengembangkan dan mempertahankan usaha nasabahnya.
3. Membantu pemerintah Yaitu dalam berbagai bidang dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.3.5. Prinsip-prinsip Kredit

Dalam memberikan kredit kepada calon nasbah, bank memerlukan pertimbangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang ada di dalam Bank sehingga sasaran dan tujuan kredit dapat tercapai. Bank juga harus dapat menjamin bahwa pengambilan kredit dapat dilakukan degan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang di buat sebelumnya.

Penilaian terhadap kriteria calon nasabah perlu dapat dilakukan oleh bank sebelum memberikan kredit. Penilaian kredit dapat dilakukan analisis 5C's .Metode analisis 5C's adalah sebagai berikut :

a. **Penilaian Watak/Kepribadian (*Character*)**
b. **Penilaian Kemampuan (*Capacity*)**
c. **Penilaian terhadap modal (*Capital*)**
d. **Penilaian terhadap anggunan (*Collateral*)**
e. **Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)**[12]

1. Watak (*character*), adalah menggambarkan watak dan keperibadian calon debitur. Manajemen perlu mengetahui karakter calon debitur untuk mengetahui apakah debitur mempunyai keinginan untuk membayar pinjamanya sampai dengan lunas.
2. Kemampuan (*Capacity*), Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan calon dibitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu kredit.
3. Modal (*Capital*), Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur berapa banyak dana yang akan diikut sertakan dalam proyek yang dibiayai calon debitur.
4. Anggunan (*Collateral*), Merupakan jaminan/anggunan yang diberikan oleh debitur atas kredit yang diajukan . Anggunan di anggap sebagai sumber pembayaran kedua yang artinya apabila debitur tersebut tidak dapat

[12] Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Cetakan Pertama Sinar Grafika Jakarta.2010. hal 269-274.

membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet maka anggunan tersebut dapat dieksekusi.

5. Kondisi (*Condition*), Merupakan anlisis terhadap kondisi perekonomian. Manajemen perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikatakan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur pada masa yang akan datang.

2.4 Pemberian Kredit

Dalam rangka mencapai tujuannya, setiap perusahaan mempunyai organisasi untuk menjalankan opersiaonal perusahaan yang bersangkutan. Dalam dokumen yang digunakan, selama pemberian kredit dapat dilakukan dengan baik oleh pihak bank maupun nasabah.

2.4.1.Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, Bank harus memperhatikan jumlah atau besar kecilnya kas yang tersedia. Kas merupakan aktiva lancar yang dimiliki dan digunakan pada semua perusahaan, dimana kas memegang peranan penting yang cukup besar dalam menjalankan semua aktivitas dalam perusahaan. “Kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki bank dan siap digunakan didalam transaksi bank setiap saat diinginkan”.

Dalam kata lain, Bank tidak mungkin memberikan kredit jika jumlah kas yang tersedia tidak mencukupi untuk diberikan kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk menjaga lukuiditas dari bank yaitu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga bisa dilihat bahwa yang dimaksud dengan prosedur pemberian kredit disini adalah pengeluaran kas untuk pemberian kredit.

Menurut Kasmir, Prosedur umum pemberian kredit yaitu :

a. Pengajuan proposal,

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman,

c. Penilaian Kelayakan Kredit,

d. Wawancara Pertama,

e. Peninjauan Ke Lokasi,

f.Wawancara Kedua,

g. Keputusan Kredit,

h. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya,

i.Realisasi Kredit.[13]

a. Pengajuan Proposal

Untuk memproleh fasilitas kredit dari perusahaan maka tahap yang pertama mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan.surat permohonan tersebut akan diuji oleh bagian kredit.

b. Penelidikan Berkas Pinjaman

Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan. Jika belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. Dalam penyidikan berkas hal-

[13] Kamsir,**Manajemen Perbankan**, Edidi kesebelas, Cetakan kesebelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,hal105-112.

hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit yang dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

d. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapat keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengakp seperti yang diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dalam kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan terstruktur, tidak tersetruktur atau wawancara pertama atau dengan cara menjebak nasabah.

e. Peninjauan Kelokasi

Setelah memproleh keyakinan atas keabsahan dokumen pada saat melakukan *on the sport* hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa

yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebernya. Tujuan peninjauan kelapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f. Wawancara Kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegitan perbaikan kertas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the sport* dilapangan. Catatan yang ada dipermohonan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *one the sport* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menemukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya.

h. Penandatanganan Akat Kredit/ Perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akat kredit,kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau dengan surat perjanjian yang dianggap perlu.

i. Realisasi Kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

2.4.2. Fungsi yang terkait

Dalam pemberian kredit agar tidak terpusat hanya satu bagian saja, maka dibentuklah beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut akan saling berkoordinasi dalam mengevaluasi fungsi yang terkait dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

a. Pemisahan fungsi organisasi yang memadai
b. Sistem otorisasi dan prosedur yang memadai
c. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap organisai.[14]

Adapun fungsi-fungsi terkait antara lain :

a. Fungsi Secretariat

   Fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan permohonan kredit dan surat pemberitahuan

b. Fungsi Penagihan

   Fungsi ini bertanggungjawab melakukan penagihan piutang kangsung kepada debitur berdasarkan daftar piutang yang akan ditagih.

c. Fungsi Kas

   Fungsi ini bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran uang.

d. Fungsi Akuntansi

   Fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan dan pengeluaran kas serta menyelenggarakan laporan keuangan.

e. Fungsi Pemeriksa Intern

   Fungsi ini bertanggungjawab untuk menegecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi.

---

[14] Loc.cit

2.4.3. Dokumen yang digunakan

Dokumen adalah formulir-formulir yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi.

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit adalah :

a. Formulir permohonan kredit

b. Kwintansi

c. Bukti Pengeluaran Kas

d. Bukti Penerimaan Kas

e. **Kartu Pinjam** [15]

a. Formulir Permohonan Kredit

Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dari peminjam dan tanda tangan dari pengurus sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

b. Kwintansi

Kwintansi dibuat rangkap tiga (3) sebagai bukti telah mengeluarkan uang.

c. Bukti Pengeluaran Kas

Dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit

d. Bukti Penerimaan Kas

Sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit.

e. Kartu Pinjam

Kartu pinjam dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

---

[15]Loc.Cit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian.

Objek penelitian ini adalah Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur yang beralamat di JL. Serdang No 173 A. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ,Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang terdiri dari non angka atau yang bersifat deskriptif berupa kata-kata kalimat. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

   Data primer yaitu data penelitiannya yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara). Menurut Jadongan Sijabat : **"Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)"**. [16]

   Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Perbaungan Hombar Makmur .

2. Data Sekunder

[16] Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Modul: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommenses, Medan, 2014, Hal 85.

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat melalui orang lain). Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak : "**Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga**[17]".

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produk yang ditawarkan oleh perusahaan, prosedur pemberian kredit , formulir yang digunakan dalam pemberian kredit ,data jumlah pemberian kredit, serta data piutang tak tertagih (data kredit macet) pada PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur.

3.3 Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

   Penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan sehingga data dan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Dokumentasi

[17] Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan kedua: Fakultas Ekonomi UHN, Medan 2011,Hal 107.

b. Menurut Mahi M. Hikmat : "**Dokumentasi yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia**[18]".

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian ini. Misalnya seperti sejarah perusahaan, prosedur pemberian kredit, formulir yang digunakan dalam pemberian kredit, data jumlah pemberian kredit, serta data piutang tak tertagih (data kredit macet).

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam memperoleh informasi adalah metode wawancara langsung dengan bagian akuntansi, kasir, dan bagian internal audit yang memberikan informasi lebih dalam tentang pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan di PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan cara membaca buku, jurnal serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti skripsi mengenai pemberian kredit, jurnal mengenai pengendalian intern kredit. Undang-undang perbankan,

[18] Hikmat, Mahi M, **Metode Penelitian,** Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Yogyakarta 2014, hal.83.

buku sistem informasi akuntansi, buku perbankan mengenai perkreditan buku sistem pengendalian internal dan lain sebagainya.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis suatu masalah, dapat dilakukan beberapa metode analisis yang disesuaikan dengan keadaan dan bentuk data yang diperoleh dari PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbaungan Hombar Makmur , adapun metode yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data, penyusunan dan pengklasifikasian serta menginterprestasikan sehingga memberikan gambar umum mengenai kebijakan yang dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Menurut Morissan:

"**Penelitian Deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermatnya dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan wartawan.**[19]

2.Metode Analisis Komparatif

Metode Analisis Komparatif adalah suatu metode yang membandingkan teori yang berlaku dengan praktek yang diterapkan sehingga akan dapat diketahui gambaran penyimpangan dan selanjutnya membuat kesimpulan yang sebenarnya

[19] Morissan, **Metode Penelitian Survei,** Cetakan Ketiga Prenada Media Grou, Jakarta, 2015, hal.37.

dari masalah yang diteliti. Tujuan dari metode dari komparatif ini yaitu menemukan persamaan persamaan dan perbedaan perbedaan tentang prosedur kerja, tentang ide ide serta pengendalian intren pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur.